

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
LABEL (Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**SYAMRIANTI BASRI**

**NIM : 10400115028**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamrianti Basri  
NIM : 10400115028  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 03 Juli 1997  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jln. Poros Pallangga (Manyampa)  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan  
Label (Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2019

Penyusun,



SYAMRIANTI BASRI  
10400115028

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label Merek (Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)", yang disusun oleh saudari Syamrianti Bawri, NIM : 10400115028, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 bertepatan dengan 29 Syawal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 2 Juli 2019

29 Syawal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag.  
Munaqisy I : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.  
Munaqisy II : Ashar Sinelele, S.H., M.H.  
Pembimbing I : Ahkam Jayadi, S.H., M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP: 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala nikmat, Rahmat dan Inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan sahabat-sahabat, serta oarang orang yang mengikuti risalahnya.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Putusan No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)* dalam proses penyusunan proposal, penelitian sampai tahap penyelesaian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan moral dan motivasi dari berbagai pihak dan Akhirnya skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena iu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Ahkam Jayadi S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Fadli Andi Natsif S.H. M.H.** selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing penulis, Ibu **Dr. Andi Safriani S.H. M.H.** selaku Penguji I dan Bapak **Ashar Sinilele, S.H, M.H** selaku Penguji II.

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada orang tua Penulis, yaitu Ayahanda Tercinta Basri Sattu (alm) dan Ibunda Tercinta Dra.Hj. St. Syamsiah Sailallah yang selama ini memberikan dorongan motivasi, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan moral dan materil yang begitu besar dalam membesarkan penulis hingga dapat

menjadi seperti sekarang ini, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih yang paling dalam dari lubuk hati. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari. M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor yang dengan berbagai kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan segala proses perkuliahan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Darussalam. M.Ag. Dr. Halim Talli, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Hamsir, S.H, M.Hum Selaku Wakil Dekan II, Dr. Muh Saleh Ridwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Ketua Jurusan Ibu Istiqamah S.H M.H dan seketaris jurusan Bapak Rahman Syamsuddin S.H, M.H serta staf yang sudah banyak membantu dalam hal hal pengurusan berkas berkas selama penyusunan skripsi berlangsung.
4. Bapak Dr. Marilang S.H. M.H. selaku Penasehat Akademik Ilmu Hukum A Kelompok 2 2015.
5. Para dosen/asisten dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menempuh perkuliahan yang telah ikhlas mentrasfer ilmunya, dan segenap staf pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi yang memuaskan, dan memudahkan penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Yulianti Muhidin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa selaku narasumber yang telah banyak membantu penulis dan memberi Informasi yang berkenaan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Saudara Ahmadi Bin Rustan, yang telah memberikan semangat, motivasi, cinta dan kasih baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menemani penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Keluarga Besar Sailellah Dg. Naba yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada saudari Nur Haefa Khairunnisa S.H, yang dari awal pemilihan judul hingga sekarang yang tidak pernah lelah membimbing membina dan terlalu baik hati dalam membantu penulis dalam perampungan skripsi ini, tanpa kamu aku bukan siapa-siapa.
11. Teman-teman Seperjuangan Para mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, terutama kepada Teman-teman Kelas Ilmu Hukum A 2015 serta Kelas Kosentrasi Hukum Pidana 2015. Khususnya *Six Best* Andi Mahfud Arya Wardana, A. Nur Alfidah Putriansah, Aswar, Annur Saputri dan Ifan Andinata yang telah menemani dan membantu saya selama masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi.



12. Teman-Teman seperjuangan selama 45 hari KKN di Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Akbar, Aidil, Anto, Rudi, Indah, Kurni, Husni, Gita, Arinil yang telah banyak menyemangati Penulis agar selesai secepatnya.
13. Rekan PPL Pengadilan Negeri Maros, Ince, Mahfud, Fida, Yading, Ramlah. yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung
14. Sahabat sedari kecil penulis yaitu Fauziah Amin, Alifah Nurkhairina, dan Aufa Fairuz Fadhilah yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung
15. Sahabat Seperjuangan SMA Nurjannah Kadir, Wahida Ulfa, St. Hadijah Yusuf, Widya Dwi Astuti, Nurfickriani, Firman, Ardhiah Sulistiawati, Muh. Muflih Raif, Aan Saputra, Pungkhy Nur Indah Sari yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Gowa, 7 Juni 2018

Syamrianti Basri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK .....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Mafaat penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Pemidanaan .....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Pupuk .....	31
1. Pengertian Pupuk .....	31
2. Landasan Hukum Mengenai Pupuk .....	34
3. Jenis-Jenis Pupuk .....	35
4. Tindak Lanjut Audit Pengawasan Pupuk Dan Pestisida.....	36
5. Jenis Izin Pupuk dan Pestisida .....	38
6. Ketentuan Hukum Label. ....	39



C. Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Label .....	40
D. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen .....	43
E. Pandangan Islam Mengenai Larangan Pemalsuan .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Instrumen Penelitian .....	56
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa .....	58
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Label Pada pupuk. ....	58
C. Penerapan Hukum pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Label yang terjadi di Kabupaten Gowa Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm .....	62
1. Posisi Kasus .....	62
2. Tuntutan Penuntut Umum .....	63
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	65
4. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus Pemalsuan label pada Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm .....	70
D. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label Pada Pupuk dalam Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm. ....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Implikasi Penelitian .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ اِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَ اِ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
9z	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).



## 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muḥammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsilallaḏi bi*

*Bakkatamubārakan SyahruRamaḏān al-laḏiunzilafih*

*al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn*

*al-Ṭūsī*

*AbūNaṣr al-*

*Farābī Al-*

*Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

<i>swt.</i>	=	<i>subhānahūwata ‘ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijrah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
<i>l.</i>	=	<i>Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)</i>
<i>w.</i>	=	<i>Wafat tahun</i>
<i>QS</i> <i>.../...: 4</i>	=	<i>QS al-Baqarah/2: 4 atau QS</i> <i>Āli ‘Imrān/3: 4</i>
<i>H</i>	=	<i>Hadis riwayat</i>

## ABSTRAK

**Nama** : Syamrianti Basri  
**Nim** : 10400115028  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Studi Putusan No. 385/ Pid.Sus/2017/ PN.Sgm)

---

Penelitian membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Studi Putusan No. 385/ Pid.Sus/2017/ PN.Sgm) dengan mengambil sub masalah yaitu; (1). Bagaimana Penerapan Hukum pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Label pupuk yang terjadi di Kabupaten Gowa (2). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Label pupuk yang terjadi di Kabupaten Gowa.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan normatif-Empiris, dengan metode pengumpulan data adalah bahan hukum primer berupa *interview* serta bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur hukum lainnya dan arsip-arsip resmi di pengadilan Negeri Sungguminasa terkait dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Penerapan Hukum pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Label pupuk (1). Perbuatan Terdakwa MUH. BASRI DG. NARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU RI No.12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 4 Ayat (1) Permentan No.70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. (2) Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana ada 3 Unsur yang terpenuhi (a). Unsur barang siapa (b). Mengedarkan pupuk di Wilayah Republik Indonesia, (c). Unsur Tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta tidak sesuai dengan label.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana, ringan seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang jika itu terus menerus dilakukan oleh pelaku usaha mengedarkan pupuk dengan menggunakan label palsu tanpa izin dari dinas kementerian pertanian dapat membayakan tanaman dan berdampak pada manusia sendiri jika mengonsumsi pangan karena pupuk tersebut belum teruji klinis, tidak memenuhi standar mutu, terjamin efektivitas dan keamanannya digunakan oleh petani.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Pemalsuan Label

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta meningkatnya produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani. Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula.

Selain pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang ditetapkan berdasarkan Permentan. Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani) diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi



terkait baik di pusat maupun daerah. Disadari keberadaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional disamping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.<sup>1</sup>

Upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dari pertanian dibutuhkan ketersediaan *input* yang mudah untuk diperoleh. Salah satu *input* yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi adalah pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 505/Kpts/Sr.130/12/2005 Pasal 1 menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk sebagai salah satu input pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha tani di Indonesia, petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan dalam usaha intensifikasi<sup>2</sup>

Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk

---

<sup>1</sup>Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018

<sup>2</sup><http://kajianpupukbersubsididiIndonesia.html>. Diakses Pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 17:25 WITA

juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus memproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Fungsi pemerintah sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk di dalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran<sup>3</sup>

Selain pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di masyarakat kita yaitu peredaran pupuk dengan menggunakan label palsu atau label tersebut tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh masyarakat kita sendiri karena minimnya pengetahuan tentang label dan izin label yang diberikan kementerian pertanian, tanpa di sadari hal ini telah melanggar pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) ); dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>3</sup>Firmansyah. *Analisis pola pendapatan rumah tangga pertanian pra dan pasca terjadinya krisis ekonomi di Indonesia: Aplikasi multiplier decomposition pada sistem neraca sosial ekonomi 1995-1999. Jurnal Ekonomi Pembangunan.*

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Jo. Pasal. 37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “ Pupuk yang akan beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, serta di beri label”

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang di mana sesuai pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus di lindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredarnya pupuk dengan label palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementerian pertanian, Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Dari uraian diatas, sangat di perlukan peran pengawasan yang ketat dari pemerintah dan aparat yang berwajib dalam memberantas kejahatan dibidang pertanian ini, maka dengan ini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap putusan Nomor: No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm, serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan

permasalahan tersebut penulis akan menuangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)**

### **B. Fokus dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana putusan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label atau menggunakan label palsu dalam daerah hukum pengadilan Sungguminasa yang dilakukan oleh Muh.Basri Dg.Narang pada tahun 2017 yang dadili di pengadilan Negeri Sungguminasa studi putusan No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.

#### **1. Tindak Pidana**

Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHPid, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strfbaar feit* ini sebagai tindak pidana.<sup>4</sup>

Stafbaar feit terdiri dari 3 kata<sup>5</sup>, yakni straf, baar dan feit. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum perkataan Baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh.

---

<sup>4</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.55.

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*(Jakarta: PT.Grafindo, 2002), h.69.

Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Moeljatno, UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa,” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid.<sup>6</sup>

Didalam KUHP tindak pidana atau delik dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga. Kemudian, tindak pidana diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil), Delik Dolus dan Delik Culpa, Delik Commissionis dan Delik Ommisionis, Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan), dan Jenis Delik yang Lain.<sup>7</sup>




---

<sup>6</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.57.

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58-62.

## 2. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu, kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>8</sup>

## 3. Pengertian Pupuk

- a. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- b. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- c. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.<sup>9</sup>

## 4. Label Palsu

- a. Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.

---

<sup>8</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 10.30

<sup>9</sup>Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018



- b. Label Palsu adalah keterangan tidak sah atau ilegal berupa keterangan pada kemasan produk baik yang berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk yang dilakukan diluar prosedur dan peraturan penggunaan label yang berlaku.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis membatasi Permasalahan yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Label pupuk yang terjadi di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Label pupuk yang terjadi di Kabupaten Gowa?

### ***D. Kajian Pustaka***

Selanjutnya penulis mengambil dari buku Frans Maramis yang berjudul “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia yang merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam kitab UU Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam UU di luar KUHPidana), dan yang tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik ketentuan umum maupun tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, perbedaan buku ini dari skripsi penulis adalah dalam buku ini hanya

membahas mengenai tindak pidana secara umum tidak membahas mengenai Tindak pidana Pemalsuan Merek.

Selanjutnya penulis mengambil dari Jurnal Akhmad Khisni “Efektivitas Penegakan Hukum pidana (Studi terhadap penegakan hukum kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilakukan oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara)” yang membahas mengenai Penerapan Sanksi pidana dan efektifitasnya dalam Kasus pembuatan Pupuk palsu yang komposisi atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan asli dan secara pasti tidak memiliki jaminan kualitas. Jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi penulis dari segi Objeknya, jika Jurnal tersebut membahas mengenai pupuk palsu/oplosa skripsi penulis membahas mengenai Pemalsuan Merek pada Pupuk.

Pending Dadih Permana dalam Literatur yang berjudul “Pedoman Pengawasan Pupuk Dan Pestisida” yang membahas mengenai Pupuk dan pestisida adalah sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian target produksi nasional. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan dampak negatif dari peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, maka perlu dilakukan pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida secara terkoordinasi antara pusat dan daerah serta antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida. Selain itu, pengawasan pupuk dan pestisida perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai permasalahan yang timbul akibat peredaran pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar termasuk peredaran pupuk dan pestisida palsu, perbedaan skripsi penulis dengan literatur ini adalah didalam literatur ini hanya membahas mengenai

Peredaran dan pengawasan Peredaran Pupuk di Indonesia yang tidak membahas mengenai tindak pidana pemalsuan Merek pada pupuk secara rinci.

Syafrizal dalam Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan Dan PKRT Bogor, Agustus 2016 yang berjudul “Peran Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pengawasan pupuk dan pestisida” yang di tungakan dalam Kementan.Pdf membahas mengenai Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk dan pestisida, sehingga pupuk dan pestisida dapat tersedia sampai di tingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau, perbedaan literatur ini dengan skripsi penulis adalah di dalam literatur ini hanya membahas mengenai pengawasan peredaran pupuk tanpa membahas secara rinci mengenai Pemalsuan Merek pada Pupuk yang beredar di Indonesia.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perlindungan Konsumen” yang membahas mengenai Pengaturan Hukum terhadap Hak-hak dan kewajiban seorang konsumen dan pelaku usaha, yang dimana konsumen adalah seorang pemakai atau pengguna barang atau jasa yang harus di jamin adanya kepastian hukum terhadapnya diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang seorang pelaku usaha terhadap konsumen. Perbedaan antara Skripsi penulis dengan buku tersebut adalah di dalam buku Perlindungan Konsumen hanya membahas mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen terhadap

pelaku usaha tanpa membahas secara rinci mengenai Perlindungan konsumen terhadap pemalsuan merek dalam kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam buku yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan” yang membahas mengenai Pengaturan-Pengaturan Hukum tindak pidana pemalsuan yang berisi mengenai perlindungan terhadap informasi, berita atau isi suatu tulisan sebagai objek suatu tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis, dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan baik berupa pemalsuan, keterangan, surat, sumpah palsu, termasuk pemalsuan uang dan merek dalam KUHP atau menyiarkan isi siaran yang bersifat bohong dalam UU Penyiaran. Perbedaan buku ini dengan skripsi penulis adalah, di buku ini hanya membahas mengenai tindak pidana pemalsuan secara garis besar tanpa membahas pemalsuan merek pada label pupuk secara rinci.

Erlina S.H., M.H dalam jurnal yang berjudul “Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generik dan Descriptive” yang membahas tentang pendaftaran Merek Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-

barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah, di jurnal ini hanya membahas mengenai tentang pendaftaran merek secara garis besar tanpa membahas pemalsuan merek pada label pada pupuk secara yang lebih rinci.<sup>10</sup>

### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan hukum mengenai Tindak pidana Pemalsuan Label pupuk yang terjadi di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku Tindak pidana Pemalsuan Label yang terjadi di Kabupaten Gowa.

### ***F. Manfaat penelitian***

Hasil penelitin tersebut dapat diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap perkara-perkara yang terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya larangan pengedaran pupuk dengan menggunakan Label Palsu.
2. Menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Serta menjadi

---

<sup>10</sup> Erlina S.H. M.H., “Jurisprudentie Volume 3 Nomor 1 Juni 2016”, Pendaftaran Terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptiv. <http://jurnal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3623/3320> (20 Maret 2019)

informasi bagi pemerintah guna meningkatkan perhatian terhadap pengedaran pupuk dengan menggunakan Label palsu yang kadang luput dari pengawasan.





## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.<sup>16</sup>

Selain dari penjelasan diatas ada beberapa istilah lain dari tindak pidana di antaranya delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, *Criminal act*, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak pidana itu sendiri.<sup>17</sup> Menurut Prof. Dr. Sopo santoso dalam bukunya, Tindak pidana berarti suatu pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Selanjutnya, dalam beberapa literatur hukum dan perundang-undangan yang ada, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Tindak Pidana*, dapat di katakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I (Cet.I, Jakarta: PT. Grafindo, 2002), h.67.

<sup>17</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.12.

tentang Hak Cipta, UU No.11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Th.1999), dan perundang-undang lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H

- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum Indonesia, Prof. A Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah ini, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1)
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strfbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1”. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah seperti pada judul buku beliau “Delik-Delik Percobaan Delik –Delik Penyertaan”, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.

- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana” begitu juga Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”.
- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3)
- g. *Perbuatan Pidana*, suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik dalam perundang-undangan maupun peraturan daerah.<sup>18</sup>

Dari berbagai istilah diatas, peneliti berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Yang mana dalam undang-undang perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana bagi yang melanggarnya.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai<sup>19</sup> :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

---

<sup>18</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.193.

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.71.

Adapun alasan Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana lebih tepat adalah:

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu (perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat.
- c. untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.78.

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Maksudnya ialah unsur tindak pidana ini berlandaskan pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>21</sup> Menurut *Moeljatno* sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, unsur tindak pidana<sup>22</sup> adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna sebagaimana definisi beliau yang menyatakan bahwa, “Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”,<sup>23</sup> maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara lain:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>21</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, h.193.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.72.

*Vos* merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana tersebut adalah:

### a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan.

Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*natalen*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.<sup>24</sup> Contoh perbuatannya yaitu tidak memberikan pertolongan (531).

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h.83-84.

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit.

Yang dimaksud tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya. Contohnya perbuatan : menghilangkan nyawa (338), abstrak, terdiri banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya. Misalnya mencekik, menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya.

Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih kongkrit, misalnya mengambil (362, pencurian), memberi keterangan (242), mengedarkan (247), dan lain-lain.

#### **b. Unsur Melawan Hukum**

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/materiel wederrechtelijk).<sup>25</sup> Karena bersumber pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.86.



Namun, ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas didalam undang-undang.<sup>26</sup> Contohnya, pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi<sup>27</sup>:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dari sudut pandang undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:

- 1) Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), istilah inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya dalam pasal 362, 368, 369, 372, 378.
- 2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (*zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya pasal 548, 549c.
- 3) Tanpa izin (*zonder verlof*), misalnya pada pasal 496, 520.

<sup>26</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), h.14.

<sup>27</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, 2010), h.88.

- 4) Melampaui kekuasaannya (*met over schrijding van sijne bevoegdheid*), misalnya pada pasal 430.
- 5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (*zonder inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*), misalnya pada pasal 429.

Kelima istilah tersebut diatas merupakan pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat.

### c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*.<sup>28</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa *geen starafbaar feit zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>29</sup> Menurut hemat peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu tindak pidana.

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 89-90

<sup>29</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 14.

#### **d. Unsur Akibat Konstitutif**

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. Misalnya pada pasal 288 jika akibat luka berat (ayat 2) tidak timbul, maka yang terjadi adalah berupa kejahatan yang selesai yakni bersetubuh dengan wanita yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka (bukan luka berat, ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan wanita yang belum waktunya dikawini yang menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, timbulnya akibat ialah setelah perbuatan dilakukan.

#### **e. Unsur Keadaan yang Menyertai**

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat<sup>30</sup>:

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 103-106.

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut pasal 285, 289, dan 368.
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, hal ini merupakan syarat untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan, misalnya pada pasal 363 (1) sub 5 tentang cara-cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 3) Mengenai obyek tindak pidana, yakni berupa semua keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian (pasal 362).
- 4) Mengenai subyek tindak pidana, yaitu segala keadaan dirisubyek tindak pidana, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif adalah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI (451). Sedangkan, yang bersifat subyektif adalah keadaan mengenai batin subyek hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (pasal 340, 353).
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada ditempat kediaman (pasal 363 ayat 1 ke-3).

- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat pemberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

- 1) Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*)

- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltherorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

### 3) Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>31</sup>

### 3. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

---

<sup>31</sup>Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta; mitra wacana media 2014). h. 244-249

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Adapun beberapa Jenis-jenis pemidanaan yang terdiri atas:<sup>32</sup>

- a) Pidana pokok

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Kurungan,
- 4) Denda.

- b) Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu,
- 3) Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>32</sup>Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta; Mitra Wacana Media 2014) . h 243.



Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut:

1. Pidana pokok;
  - a. Pidana penjara: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
  - b. Pidana kurungan: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
  - c. Pidana tutupan: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
  - d. Pidana denda: Jaksa;
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang di cabut tersebut;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu; jaksa
  - c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri.

Terdapat beberapa teori pembedaan atau dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

## 2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltherorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

## 3. Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pupuk**

### **1. Pengertian Pupuk**

- a. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

---

<sup>33</sup>Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta; mitra wacana media 2014). h. 244-249

- b. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- c. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- d. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama (makro) dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
- e. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologi untuk menghasilkan formula pupuk.
- f. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh

Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (*PPNS*) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyuluh adalah petugas pertanian lapangan yang ditunjuk membantu KPPP dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- l. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
- m. Standar mutu pupuk adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
- n. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
- o. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

- p. Penggunaan adalah tata cara aplikasi pupuk untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
- q. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
- r. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
- s. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
- t. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.
- u. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri.
- v. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.<sup>34</sup>

## **2. Landasan Hukum Mengenai Pupuk**

- a. UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- b. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>34</sup>Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018, Hal. 3

- c. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
- d. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya.
- e. Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- f. Kepmentan No.237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
- g. Kepmentan No.239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk An-organik.
- h. Permentan No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi untuk sektor Pertanian TA. 2016.
- i. Permentan N0.43/permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik.
- j. Permentan N0.70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah<sup>35</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pupuk

- a. Pupuk An-organik hara makro primer baik tunggal maupun majemuk seperti : Urea, TSP/SP-36, ZA, KCl, NP, NK PK dan NPK
- b. Pupuk An-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit
- c. Pupuk An-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair
- d. Pupuk An-organik hara mikro padat dan cair

---

<sup>35</sup>Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016 h. 5

- e. Pupuk lainnya (pupuk An-organik yang mengandung mikroba, phytohormon)
- f. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.<sup>36</sup>

#### 4. Tindak Lanjut Audit Pengawasan Pupuk Dan Pestisida

Tindak lanjut hasil pengawasan Pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, dan apabila dampak negatifnya melintas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya melintas antar Provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pupuk dan Pestisida yaitu:

- a. Tidak memiliki perizinan usaha, maka yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperoleh izin usaha;
- b. Tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak ada yang bertanggungjawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
- c. Tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;

---

<sup>36</sup>Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016 h. 13

- d. Pupuk dan Pestisida rusak, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik pestisida dari peredaran atau dimusnahkan apabila tidak dapat direformulasikan;
- e. Pupuk dan Pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan.
- f. Pupuk dan Pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
- g. Terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran untuk dimusnahkan;
- h. Terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
- i. Terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
- j. Sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Terlampauinya batas maksimum residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan, maka wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



1. Penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan dan wajib menghentikan penggunaan dan peredaran sampai pengguna/pengedar mempunyai sertifikat.<sup>37</sup>

## 5. Jenis Izin Pupuk dan Pestisida

Izin Tetap Waktunya 1 Tahun Belum bisa diedarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.

### a. Label

- 1) Nama dagang formulasi;
- 2) Jenis Pupuk dan pestisida;
- 3) Nama dan kadar bahan aktif;
- 4) Isi atau berat bersih dalam kemasan;
- 5) Peringatan keamanan;
- 6) Klasifikasi dan simbol bahaya;
- 7) Petunjuk keamanan;
- 8) Gejala keracunan;
- 9) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- 10) Perawatan medis;
- 11) Petunjuk penyimpanan;
- 12) Petunjuk penggunaan;

---

<sup>37</sup>Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016, h. 30

- 13) Piktogram;
- 14) Nomor pendaftaran;
- 15) Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor;
- 16) Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun kadaluwarsa;
- 17) Petunjuk pemusnahan.

## 6. Ketentuan Hukum Label

Pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) ); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Jo. Pasal. 37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “ Pupuk yang akan beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, serta di beri label”.

- a. Setiap wadah pupuk harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
- b. Label pupuk diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.

- c. Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
- d. Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- e. Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label.<sup>38</sup>

### ***C. Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Label***

Ada banyak tindak pidana pemalsuan yang terjadi di negara kita ini, salah satunya tindak pidana lain yang objeknya berupa tulisan atau berita, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang perbuatannya menuliskan, menyampaikan

---

<sup>38</sup>Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016

berita dan menuliskan tulisan yang isinya palsu yang terletak pada wadah atau tempat tulisan atau berita tidak benar adanya. Aturan hukum menaruh nama atau tanda secara palsu atas hasil kesusteraan dan lain lain (Pasal 380 KHUP)

Pasal 380 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1). diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh rupiah;
  1. barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu diatas atau didalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya diatas atau didalamnya tadi;
  2. barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke indonesia, hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang didalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah di taruh secara palsu tadi.
- (2). Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh di rampas.

Tindak pidana Pasal 380 masuk kelompok tindak pidana perbuatan curang, (*Bedrog*) dalam bab XXV buku II KUHP, suatu kelompok tindak pidana kebendaan yang mengandung sifat memperdaya orang atau memberi kesan sesuatu seolah-olah benar mengenai sesuatu yag palsu. Diperdayanya orang oleh sebab adanya unsur

tulisan mengenai nama atau tanda palsu yang ditaruh diatas benda hasil kesuseteraan dan lain-lain.<sup>39</sup>

Dibentuknya tindak pidana Pasal 380 ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau mengelabui dengan cara membuat secara palsu atau memalsu suatu nama atau tanda diatas hasil ciptaan orang lain. Ditunjukan agar masyarakat tidak terperdaya atau tertipu oleh adanya nama atau tanda secara palsu atau dipalsu yang diletakkan diatas atau hasil ciptaan atau buah pikiran seseorang.

Titik berat perlindungan hukumnya bukan pada hak-hak yang melekat pada di penemu atau si penciptanya. Sebagaimana juga dalam pertimbangan suatu putusan arrest hoge raad tanggal 19 januari 1941, yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bermaksud melindungi hak pengarang akan tetapi untuk dapat menghukum perbuatan penipuan-penipuan yang menimbulkan rasa tidak senang.<sup>40</sup>

Menaruh secara palsu adalah meletakan sesuatu nama atau tanda yang tidak benar diatas suatu buah hasil ciptaan seseorang, yang *in casu* kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. Sedangkan memalsu adalah perbuatan mengubah tanpa hak suatu nama atau tanda yang terdapat pada suatu buah karya orang lain. Misalnya menghapus nama A atau suatu tanda buah karya orang lain.<sup>41</sup> Hal ini dapat

---

<sup>39</sup>Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Cet. 2, Jakarta; Rajawali Pres) 2015, h. 209

<sup>40</sup>Soenarto soerodibroto, KUHAP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad, (Jakarta; PT RajaGrafindo) 1994, h. 247

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Tindak pidana Hak atas kekayaan intelektual (Haki)*, (Malang; Penerbit banyumedia Publishing) 2007, h. 14

merugikan seseorang atau orang banyak dengan memalsukan sesuatu yang tidak memiliki izin untuk memiliki apalagi mengedarkannya.

#### ***D. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen***

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>42</sup>

##### **1. Hak Konsumen**

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa
- b. hak untuk memilih dan mendapatkan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>42</sup>Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **2. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.**

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lainm adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan larangan sebagai berikut:

- (1). Pelaku usaha dilarang Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Jika mencantumkan informasi dan/atau jasa petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- (2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari pedaran.<sup>43</sup>

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud dalam pas diatas. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

#### ***E. Pandangan Islam Mengenai Larangan Pemalsuan.***

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela

---

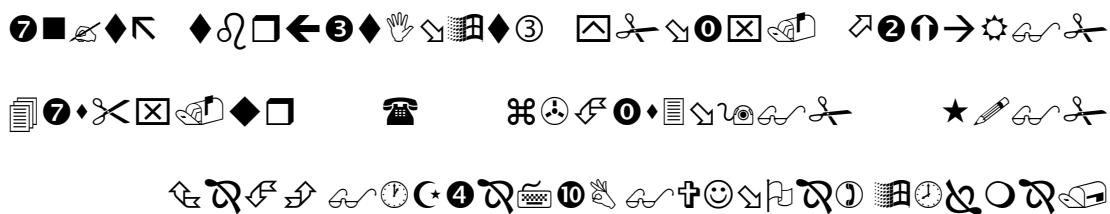
<sup>43</sup>Ahmad Miru dan Sutarman yodo, *Hukum Perindungan Konsumen* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada), 2015, h. 63-64

<sup>44</sup>Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung; Mandar Maju) 2000, h. 18

(akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT antara lain;

a. QS. An-Nisa' ayat 50;



Terjemahan:

“Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).”<sup>45</sup>

Ayat tersebut menjelaskan betapa tercelanya perbuatan pemalsuan, atau melakukan dusta dan kebohongan. Dalam surah lain juga di jelaskan larangan berdusta.

b. surah Al Maidah Ayat 41;



<sup>45</sup>Al Quran dan terjemahan Surah An-Nisa Ayat 50



itu) Amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan Amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamumereka merobah, perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, Maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini Maka hati-hatilah". Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”<sup>46</sup>

Dari ayat diatas bisa disimpulkan pokok bahasan dalam ayat diatas sebagai berikut;

1. Allah menyuruh nabi Muhammad agar jangan cemas dan terpengaruh oleh perbuatan kaumnya yang dengan mudah menjad kafir.
2. Orang munafik dan orang yahudi senang sekali mendengar pembicaraan dan propaganda bohong mengenai pribadi dan kerasulan Muhammad SAW. Mengubah isi kitab Taurat dan hanya mau menerima suatu hukum kalau sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Kalau tidak, maka hukum itu mereka tolak.
3. Hati mereka tidak akan dibersihkan. Mereka hina di dunia dan akhirat kelak akan mendapatkan siksaan yang amat berat.

---

<sup>46</sup>Al Quran dan terjemahan Surah Al- Maidah Ayat 41

Allah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada orang yang lebih dzalim dari orang-orang yahudi yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Perkataan mereka telah mengingkari ajaran agama tauhid. Begitu juga seperti mereka yang mengaku telah menerima wahyu dari Allah SWT, seperti musailamah Al-Kadzab, al-Aswad al-'Ansi, Tulaihah al-asadi.

Allah menyebutkan ancaman dan siksaan yang diterima oleh orang dzalim itu, dikala mereka menghembuskan nafas yang terakhir, sebagai imbalan kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Sungguh dahsyat siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dzalim itu pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut yang tidak dapat terlukiskan. Dan pada waktu itu, malaikat akan mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang berlumur dosa dengan renggutan yang keras.

Lima macam dosa yang tidak ada tebusannya:

1. Syirik terhadap Allah;
2. Membunuh orang tanpa hak;
3. Membuat tuduhan palsu terhadap seorang mu'min;
4. Lari dari barisan kaum muslimin dalam perang;
5. Sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain.

Perkara Yang Dbolehkan Berbohong

Pada dasarnya dusta merupakan perbuatan tercela yang dilarang, namun jika tiada jalan keluar lagi untuk mencapai tujuan yang baik, maka berdusta itu diperbolehkan. Misalnya seperti menyembunyikan seorang kawan muslim yang tengah diancam bunuh oleh penjahat, orang dzalim, atau orang kafir. Maka demi

keselamatan jiwanya, orang boleh berdusta bahkan dalam contoh ini orang wajib berdusta.

Dari Ummu Kultsum RA, Rasulullah SAW bersabda;

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

Terjemahan:

“Tidak dihukumi dusta lagi, orang yang berbohong demi terciptanya perdamaian diantara masyarakat yang tengah bermusuhan atau berselisih, sehingga mereka menjadi baik atau berkata baik. (HR. Bukhari Muslim).

Ditambahkan dalam riwayat lainnya; Ummu kultsum berkata: “belum Pernah ku dengar adanya keringanan tentang dusta sedikitpun, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

1. Ketika berkecamuknya perang
2. Dalam mewujudkan perdamaian diantara masyarakat atau bangsa yang tengah dilanda permusuhan atau perselisihan.
3. Omongan suami terhadap istrinya atau sebaliknya, demi terciptanya kerukunan dalam rumah tangga. (HR. Muslim).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup><http://muhammadhakimazhari.blogspot.com/2014/04/pemalsuan-menurut-undang-undang-negara.html?m=1> diakses Pada tanggal 24 Juli 2018, Pukul 09.45 WITA

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Terkait penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Pendekatan normatif, adalah salah satu jenis penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan pendekatan Empiris adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja didalam masyarakat<sup>48</sup>. Sehingga yang dimaksud dengan normatif-Empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penunjukan secara *purposive* (langsung), dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah karena penulis berdomisili di Kabupaten Gowa untuk akses mendapatkan informasi terkait kasus tersebut lebih mudah dan terjangkau.

---

<sup>48</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. II; Depok: Peranamedia Group, 2018), h.150.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang melihat secara yuridis (hukum). Dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran dan situasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm) di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Selain Pendekatan yuridis, maka disini penelitian juga akan melakukan pendekatan empiris, dengan tujuan merujuk langsung kepada para pihak yang berperkara di pengadilan tersebut, guna mencari informasi yang lebih lanjut serta yang lebih efektif terkait dengan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm) di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

## ***C. Jenis dan Sumber Data***

### **1. Jenis Data**

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian. data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Pengadilan Negeri Sugguminasa sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.



## 2. Sumber Data

Sumber yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut narasumber penelitian. narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. adapun tehnik yang digunakan untuk menentukan narasumber lain yaitu :

### *Sampling Purposive*

Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini menentukan sejumlah narasumber yang dianggap tetpat dapat memberikan informasi mengenai objek yang di teliti sebelum penelitian dilaksanakan, dengan cara menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan narasumber serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing narasumber, Yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa serta Bagian Kepaniteraan Pidana.

Dalam hal ini penentuan narasumber dari satu narasumber ke narasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah memperesentasikan berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *interview* (wawancara). Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari narasumber.

Adapun narasumber yang diwawancarai yakni hakim aktif dan pegawai di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan langsung terkait objek penelitian.

2. Wawancara

Dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Sungguminasa.



### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Guna melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semua nantinya. Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas insrtumen pengumpulan data.

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Pengamatan (*Observation*), yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.
2. Pedoman wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>49</sup>
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif dengan cara:

1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.

---

<sup>49</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet:I (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2004) h.68-82

2. Penyajian data, yaitu mengumpulkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi dan disajikan.

Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data tersebut akan di analisa kedalam analisis kualitatif yang merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisa teoritik.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa*

##### **1. Peta Yurisdiksi dan Kondisi Geografis**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kabupaten Gowa berada pada  $119.3773^{\circ}$  Bujur Barat dan  $120.0317^{\circ}$  Bujur Timur,  $5.0829342862^{\circ}$  Lintang Utara dan  $5.577305437^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang 90 km.<sup>50</sup>

#### **B. Pengaturan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label Pada pupuk.**

Jika berbicara mengenai pengaturan hukum tindak pidana tersebut, semua telah dituangkan dalam, pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidayatanaman berbunyi “barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) ); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Jo. Pasal. 37 ayat 1 UU RI 12

<sup>50</sup><http://pn-sungguminasa.go.id> diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 20:45 WITA

Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “ Pupuk yang akan beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, serta di beri Standar Mutu.

- 1) Standar Mutu: dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan standar mutu adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai suatu patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai suatu ukuran nilai, sedangkan mutu adalah ukuran baik buruknya suatu benda barangm kadar, taraf atau derajat dan kualitas sesuatu.
- 2) Terjamin Efektfitasnya: adalah diketahuinya manfaat dari sautu barang atau keadaan yang menunjukka tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu.
- 3) Diberi Labeli : Label adalah bagian dari produk baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjuak. Ketentun pemberian label diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
- 4) Setiap wadah pupuk harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
- 5) Label pupuk diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.

- 6) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
- 7) Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- 8) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup>Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016



***C. Penerapan Hukum pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan***

***Label yang terjadi di Kabupaten Gowa Studi Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm***

**1. Posisi Kasus**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 
- a. Nama lengkap : Muh. Basri Dg. Narang
  - b. Tempat lahir : Ulu Je'ne Kab.Gowa
  - c. Umur/Tanggal lahir : 46/27 Juli 1971
  - d. Jenis kelamin : Laki-laki
  - e. Kebangsaan : Indonesia
  - f. Tempat tinggal : BTN Gowa Lestari Blok B No.2 Kel. Batangkaluku  
Kec.Somba Opu, Kab. Gowa
  - g. Agama : Islam
  - h. Pekerjaan : Karyawan CV Reskiwati Jaya

Terdakwa Muh. Basri Dg. Narang tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017

- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
  - e. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 385/Pid.Sus/2017/PN Sgm tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2017/PN Sgm tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **2. Tuntutan Penuntut Umum**

- a. Menyatakan terdakwa Muh. Basri Dg. Narang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label” sebagaimana dakwaan KESATU kami yaitu melanggar pasal 60 ayat (1) huruf F UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Basri Dg. Narang selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

c. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 150 (seratus lima puluh) dos pupuk merek Popro;
- 2) 15 (lima belas) bungkus berisi 1 (satu) kilogram;
- 3) 10 (sepuluh) sak kapur (dolomit);
- 4) 1 (satu) botol isi 600 ml cairan warna hijau peka;
- 5) 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah gentong warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) Nota pembelian pupuk merek popro sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos dengan harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09/01/2017 an. Toko Harapan Tani Pallangga dan distempel oleh CV RESKIAWATI JAYA;
- 2) Laporan pembelian barang yang dikeluarkan oleh Toko Harapan Tani atas pembelian pupuk merk Popro sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos dengan harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dari supplier atas nama CV RESKIAWATI JAYA; Dikembalikan kepada saksi H. SAMPARA DG LALANG.

- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000. 000,00 (dua ribu rupiah); setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa MUH. BASRI DG. NARANG, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Toko Harapan tani Jl.Poros-Makassar No.51 Kamp.Bambayya KEL.Mangngalli Kec.Pallangga Kab.Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label atau menggunakan label palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2017 Terdakwa menghubungi saksi H. SAMPARA DG. LALANG (selaku pembeli/pemilik toko) melalui telpon dan menawarkan pupuk miliknya kemudian saksi H.SAMPARA DG LALANG setuju membeli pupuk tersebut sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos.
- b. Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 13.00 Wita karyawan terdakwa tiba-tiba datang mengantarkan pupuk sebanyak 450

(empat ratus lima puluh) dis sesuai pesanan saksi H. SAMPARA DG LALANG.

- c. Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dating ke Tokko saksi H.SAMPARA DG LALANG dengan membawa nota pembelian atas pupuk tersebut lalu saksi H.SAMPARA DG LALANG membayar secara tunai hatga puluk sebanyak Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit Res Krimsus Polda Sul-sel mendatangi Toko Harapan Tani di Jl. Poros Makassar-Gowa No.51 Komp.Cambayya Ke. Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa dan menemukan pupuk jenis pembenah tanah merk popro yang pada kemasannya tercantum pendaftaran No. DEPTAN P.048/DOLOMIT/PPI/VII/2006 dan pemilik toko mengaku bahwa pupuk tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Terdakwa yang pabriknya terletak di Jl. Andi Tonro RT.002 RW.004 Kel.Bontobontoa Kec.Somba Opu Kab.Gowa.
- e. Sehingga pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit Res Krimsus Polda Sul-sel ke Pabrik pupuk tersebut lalu menghubungi Terdakwa agar datang ke pabrik pupuk dan menanyakan pupuk merk popro yang ditemukan pada Toko Harapan tani,dan Terdakwa mengaku bahwa pupuk tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli serta Terdakwa memperlihatkan bahan baku serta alat yang

digunakan dalam pembuatan pupuk tersebut, maka petugas Kepolisian dari Dit Res Krimsus Polda Sul-sel meminta dokumen izin edar atau nomor pendaftaran pupuk pembenah tanah merk popro namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dengan alasan bahwa sudah bermohon pendaftaran kepada Kepala pusat varientas tanaman dan perizinan pertanian pada Tanggal 05 Desember 2015 namun tidak terbit nomor pendaftaran karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga Terdakwa tidak melanjutkan pendaftaran tersebut.

- f. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Dit Res Krimsus Polda Sulsel untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa MUH.BASRI DG. NARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU RI No.12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

## KEDUA

Bahwa terdakwa MUH.BASRI DG.NARANG ,pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Toko Harapan tani Jl. Poros-Makassar No.51 Kamp.Bambayya Kel. Mangngalli Kec. Pallangga Kab.Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, berupa formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah yang akan diproduksi dan diedarkan untuk keperluan sector pertanian harus memenuhi standard mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label kemasan dan daftar oleh Menteri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2017 Terdakwa menghubungi saksi H.SAMPARA DG LALANG (selaku pembeli/pemilik toko) melalui telepon dan menawarkan pupuk miliknya kemudian saksi H.SAMPARA DG LALANG setuju membeli pupuk tersebut sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos.
- b. Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita karyawan terdakwa tiba-tiba datang mengantar pupuk sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dis sesuai pesanan saksi H. SAMPARA DG. LALANG.

- c. Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa datang ke Toko saksi H. SAMPARA DG. LALANG dengan membawa nota pembelian atas pupuk tersebut lalu saksi H.SAMPARA DG LALANG membayar secara tunai harga puluk sebanyak Rp.13.050.000,-(tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit Res Krimsus Polda Sul-sel mendatangi Toko Harapan Tani di Jl. Poros Makassar-Gowa No.51 Komp.Cambayya Ke. Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa dan menemukan pupuk jenis pembenah tanah merk popro yang pada kemasannya tercantum pendaftaran No.DEPTAN P.048/DOLOMIT/PPI/VII/2006 dan pemilik took mengaku bahwa pupuk tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Terdakwa yang pabriknya terletak di Jl.Andi Tonro RT.002 RW.004 Kel.Bontobontoa Kec.Somba Opu Kab.Gowa.
- e. Sehingga pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita petugas Kepolisian dari Dit Res Krimsus Polda Sul-sel ke Pabrik pupuk tersebut lalu menghubungi Terdakwa agar datang ke pabrik pupuk dan menanyakan pupuk merk popro yang ditemukan pada Toko Harapan tani,dan Terdakwa mengaku bahwa pupuk tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli serta Terdakwa memperlihatkan bahan baku serta alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk tersebut,maka petugas Kepolisian dari Dit Res Krimsus Polda Sul-sel meminta dokumen izin edar



atau nomor pendaftaran pupuk pembenah tanah merk popro namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dengan alasan bahwa sudah bermohon pendaftaran kepada Kepala pusat varientas tanaman dan perizinan pertanian pada Tanggal 05 Desember 2015 namun tidak terbit nomor pendaftaran karenamasih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga Terdakwa tidak melanjutkan pendaftaran tersebut.

- f. Selanjtnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Dit Res Krimsus Polda Sulsel untuk diproses lebih lanjut Perbuatan Terdakwa MUH.BASRI DG. NARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 4 Ayat (1) Permentan No.70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.<sup>52</sup>

#### **4. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus Pemalsuan label pada Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulianti Muhidin, selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan menangani kasus tindak pidana Pemalsuan label pada pupuk mengatakan bahwa “Kasus Pemalsuan pupuk ini sebenarnya belum banyak terjadi di Kabupaten Gowa, sepanjang saya jadi hakim disini, saya baru menangani 1 kasus ini saja, hal ini karena kerja sama dan

<sup>52</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamahagung.go.id

koordinasi aparat penegak hukum seperti kepolisian dan masyarakat sangat erat sehingga jika ada tindakan yang bersifat pidana dapat segera di laporkan, disisi lain mungkin saja budaya taat hukum masyarakat di Kabupaten Gowa salah satu yang membuat minimnya tindak pidana ini masih kurang terjadi dikalangan produsen penyalur pupuk, meskipun demikian sebagai upaya Preventif yang sebaiknya dilakukan adalah tetap berfikir bahwa negara kita adalah negara hukum yang dimana segala tindak pidana telah di atur dalam KUHP maupun Undang-Undang sehingga ada kontrol terhadap setiap tindakan”<sup>53</sup>

Adapun pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa MUH.BASRI DG.NARANG yaitu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU RI No.12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yulianti Muhidin selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tanggal 27 September 2018, Pukul 08.30.

1. barang siapa;
2. Mengedarkan pupuk di Wilayah Republik Indonesia;
3. Tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta tidak sesuai dengan label.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Muh.Basri Dg.Narang dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas;

## **Ad.2. Mengedarkan pupuk di Wilayah Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat berarti menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Mengedarkan berarti membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penemuan pupuk yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label atau menggunakan label palsu yang siap dijual kepada konsumen; Menimbang, bahwa yang menemukan adanya label palsu pada pupuk yang siap jual tersebut adalah Tim anggota Polisi Daerah Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Toko Harapan Tani yang terletak di Jalan Poros Makassar- Gowa Nomor 51 Kampung Cambayya, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Tim anggota Polisi berada di lokasi kejadian karena sedang melaksanakan operasi terkait perdagangan pupuk yang tidak terdaftar atau dan menggunakan label yang tidak terdaftar dan saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat jika sedang beredar produksi pupuk dan perdagangan pupuk yang tidak terdaftar di Wilayah Kabupaten Gowa; Menimbang, bahwa tempat produksi pupuk merek Popro yang tidak terdaftar tersebut yakni di Jalan Andi Tonro RT.002/RW.004, Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dimana saat di Pabrik

tersebut Tim anggota Polisi Daerah Sulawesi Selatan menemukan bahan baku dan alat/sarana untuk membuat Pupuk merek Popro yang tidak terdaftar tersebut yakni berupa Kapur sebanyak 10 (sepuluh) sak, cairan warna hijau pekat sebanyak 1 (satu) botol isi 600 ml, Ember warna hitam sebanyak 2 (dua) buah, Gentong warna biru sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa jumlah pupuk jenis pembenah tanah merek Popro yang tidak terdaftar yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada toko saksi H. Sampara Dg Lalang pada saat itu sebanyak 150 (seratus lima puluh) dos, dimana dalam setiap dosnya berisikan 15 (lima belas) bungkus pupuk, dengan total keseluruhan pupuk sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bungkus pupuk;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut yaitu membuat dan mengedarkan pupuk tanpa adanya izin dalam wilayah Republik Indonesia, hal tersebut didasarkan pula dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dari pengakuan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka apabila perbuatan Terdakwa yaitu membuat dan mengedarkan pupuk tanpa adanya izin dalam wilayah republic Indonesia dikaitkan dengan penjelasan Unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tersebut diatas;

**Ad.3. Tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta tidak sesuai dengan label;**

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai suatu patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai suatu ukuran nilai, sedangkan mutu adalah ukuran baik buruknya suatu benda atau barang, kadar, taraf atau derajat dan kualitas sesuatu; Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 tentang Pupuk organik, Pupuk hayati dan pembenah tanah dijelaskan bahwa standar mutu adalah kandungan pupuk organik, jenis dan populasi mikroba/mikrofauna dalam pupuk hayati, atau kandungan pembenah tanah yang ditetapkan oleh badan Standarisasi nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh menteri pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak terjamin efektifitasnya adalah tidak diketahuinya manfaat dari suatu barang atau benda sedangkan yang dimaksud label adalah catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis dan genetic dari benih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penemuan pupuk yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label atau menggunakan label palsu yang siap dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa yang menemukan adanya label palsu pada pupuk yang siap jual tersebut adalah Tim anggota Polisi Daerah Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Toko Harapan Tani yang terletak di Jalan Poros Makassar- Gowa Nomor 51 Kampung Cambayya, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Tim anggota Polisi berada di lokasi kejadian karena sedang melaksanakan operasi terkait perdagangan pupuk yang tidak terdaftar atau dan menggunakan label yang tidak terdaftar dan saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat jika sedang beredar produksi pupuk dan perdagangan pupuk yang tidak terdaftar di Wilayah Kabupaten Gowa dan Tim anggota Polisi Daerah Sulawesi Selatan menemukan beberapa produk pupuk jenis pembenah tanah merek POPRO yang tidak terdaftar pada Toko Harapan Tani;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap pemilik toko tersebut, sdr. H. Sampara mengatakan jika pupuk-pupuk merek Popro tersebut diperoleh dari Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017 dimana pada saat itu juga sdr. H. Sampara memperlihatkan kwitansi nota pembelian dari Terdakwa dan kwitansi yang diperlihatkan oleh sdr. H. Sampara, harga jual dari Pupuk merek Popro tersebut senilai Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per dos, dengan nilai pembelian keseluruhan 450 (empat lima puluh) Dos X Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) = Rp. 13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh

ribu rupiah) namun sebagian dari pembelian tersebut telah laku dijual ke masyarakat;

Menimbang, bahwa tempat produksi pupuk merek Popro yang tidak terdaftar tersebut yakni di Jalan Andi Tonro RT.002/RW.004, Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dimana saat di Pabrik tersebut Tim anggota Polisi Daerah Sulawesi Selatan menemukan bahan baku dan alat/sarana untuk membuat Pupuk merek Popro yang tidak terdaftar tersebut yakni berupa Kapur sebanyak 10 (sepuluh) sak, cairan warna hijau pekat sebanyak 1 (satu) botol isi 600 ml, Ember warna hitam sebanyak 2 (dua) buah, Gentong warna biru sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa pupuk merek Popro yang dijual tersebut pada labelnya tidak terdapat nomor pendaftaran, masa edar dan tanggal produksi sebagaimana yang diatur daimana terdakwa memproduksi pupuk popro dengan nama perusahaan CV. Reskiwati milik sdr. H. Mansur Saleh (almarhum) yang merupakan orang tua dari sdri. Reskiwati, yang dikelola sepenuhnya oleh terdakwa sekitar tahun 2015;

Menimbang, bahwa jumlah pupuk jenis pembenah tanah merek Popro yang tidak terdaftar yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada toko saksi H. Sampara Dg Lalang pada saat itu sebanyak 150 (seratus lima puluh) dos, dimana dalam setiap dosnya berisikan 15 (lima belas) bungkus pupuk, dengan total keseluruhan pupuk sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh)



bungkus pupuk dan terdakwa tidak memiliki izin untuk untuk memproduksi dan mengedar pupuk popro tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut yaitu membuat dan mengedarkan pupuk yang Tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta tidak sesuai dengan label , hal tersebut didasarkan pula dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dari pengakuan terdakwa sendiri; Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka apabila perbuatan Terdakwa yaitu membuat dan mengedarkan pupuk yang Tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta tidak sesuai dengan label dikaitkan dengan penjelasan Unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengajukan permohonan agar majelis hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU RI No.12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 150 (seratus lima puluh) dos pupuk merek Popro;
- b. 15 (lima belas) bungkus berisi 1 (satu) kilogram;
- c. 10 (sepuluh) sak kapur (dolomit);
- d. 1 (satu) botol isi 600 ml cairan warna hijau peka;
- e. 2 (dua) buah ember warna hitam;
- f. 1 (satu) buah gentong warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Nota pembelian pupuk merek popro sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos dengan harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09/01/2017 an. Toko Harapan Tani Pallangga dan distempel oleh CV RESKIAWATI JAYA;
2. Laporan pembelian barang yang dikeluarkan oleh Toko Harapan Tani atas pembelian pupuk merk Popro sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos dengan harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dari supplier atas nama CV RESKIAWATI JAYA; yang telah disita dari toko harapan tani milik saksi H. Sampara Dg Lalang, maka dikembalikan kepada H. Sampara Dg Lalang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf F UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Basri Dg Narang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Basri Dg Narang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp250.000,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 150 (seratus lima puluh) dos pupuk merek Popro;
  - b. 15 (lima belas) bungkus berisi 1 (satu) kilogram;
  - c. 10 (sepuluh) sak kapur (dolomit);
  - d. 1 (satu) botol isi 600 ml cairan warna hijau peka;
  - e. 2 (dua) buah ember warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah gentong warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Nota pembelian pupuk merek popro sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos dengan harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dari supplier atas nama CV. Reskiawati Jaya tertanggal 09/01/2017;
  - b. Laporan pembelian barang yang dikeluarkan oleh Toko Harapan Tani atas pembelian pupuk merk Popro sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dos dengan harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dari supplier atas nama CV RESKIAWATI JAYA; Dikembalikan kepada saksi H. Sampara Dg Lalang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari rabu, tanggal 3 januari 2018, oleh kami, Djamaluddin Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H , Yulianti Muhidin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Samsiska Dien Ermika Syamsu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

***D. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label Pada Pupuk dalam Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.***

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

yag berarti terpenuhinya unsur-unsur Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) ); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Jo. Pasal. 37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “ Pupuk yang akan beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, serta di beri label”, sedangkan jika melihat putusan akhir majelis hakim hanya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Basri Dg Narang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yaitu Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, sedangkan kita ketahui bahwa keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta meningkatnya produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani, jika beredar pupuk dengan menggunakan label palsu yang belum tercantum izinnya di dinas kementerian pertanian dapat membayakan tanaman dan

bahkan bisa berdampak dengan apa yang di konsumsi oleh manusia sendiri karena pupuk tersebut belum teruji klinis, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitas dan keamanannya digunakan oleh petani.

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang jika itu terus menerus dilakukan oleh seorang produsen. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan hanya karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa Muh. Basri Dg.Narang telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Muh. Basri Dg.Narang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan label diatur dan diancam dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f UU RI No.12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (2). Perbuatan Terdakwa MUH.BASRI DG. NARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 4 Ayat (1) Permentan No.70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pemalsuan label (Studi Putusan No.385/Pid.Sus/2017/PN Sgm), yaitu majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keteranga terdakwa dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal Gowa ada 3 Unsur yang terpenuhi (1). Unsur barang siapa (2). *Mengedarkan pupuk di Wilayah Republik Indonesia,*

(3). Unsur *Tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektifitasnya serta tidak sesuai dengan label*. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat dan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan mneyesali perbutannya. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan jangka panjang jika perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terus menerus oleh produsen dan memberikan penjatuhan hukuman yang lebih berat sehingga penjatuhan hukumannya menurut penulis masih sangat rendah.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas;

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ringan seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang jika itu terus menerus dilakukan oleh seorang produsen jika beredar pupuk dengan menggunakan label palsu yang belum tercantum izinnnya di dinas kementerian pertanian dapat membayakan tanaman dan bahkan bisa berdampak dengan apa yang dikonsumsi oleh manusia sendiri karena pupuk tersebut belum teruji klinis, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitas dan keamanannya digunakan oleh petani.
2. Kepada pemerintah, dan aparat hukum agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pemantauan peredaran pupuk di kalangan masyarakat sehingga tindak pidana ini tidak menerus terjadi lagi dan dengan diadakannya kegiatan

sosialisasi dibidang hukum kepada Produsen dan konsumen penulis kira ini sangat bagus sehingga tidak ada lagi kegiatan transaksi jual beli yang menyalahi ketentuan perundang-undangan disisi lain dapat mengajarkan dan menghimbaukan bahwa negara kita ini negara hukum apapun tindakan telah diatur oleh hukum, baik tindakan pidana maupun perdata.

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang bwrwajib jika mengetahui adanya penggunaan label yang tidak memiliki izin, untuk segera ditinfak lanjuti sebagai langkah awal mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan label tanpa izin.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al Quran dan Terjemahan

Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2001

Chazawi Adami, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* Cet. 2, Jakarta, Rajawali Pres, 2015

Chazawi Adami, *Tindak pidana Hak atas kekayaan intelektual (Haki)*, Malang; Penerbit banyumedia Publishing, 2007

Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016

Mahrus Ali, *Dasar - Dasar hukum pidana*. Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011

Miru Ahmad dan Sutarman yodo, *Hukum Perindungan Konsumen* Cet. 9 Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015

M. Nurul Irfan, *Hukum pidana islam*, Jakarta, PT Amzah 2016

Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen* Bandung, Mandar Maju 2000

Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet: xx, Bandung: Alfabeta 2014

Soenarto soerodibroto, *KUHAP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi mahkamah agung dan hoge road*, Jakarta, PT RajaGrafindo 1994

Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta, Mitra Wacana Media 2014

Syamsuddin Rahman, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan*, Makassar Alauddin University Press, 2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Jakarta, Rajawali Pres, 2016

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, 2012

## JURNAL

Erlina. "Jurisprudentie Volume 3 Nomor 1 Juni 2016", *Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic dan Descriptive*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3623/3320>. (20 Maret 2019).

Firmansyah. *Analisis pola pendapatan rumah tangga pertanian pra dan pasca terjadinya krisis ekonomi di Indonesia: Aplikasi multiplier decomposition pada sistem neraca sosial ekonomi 1995-1999*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

## INTERNET

<http://kajianpupukbersubsididiIndonesia.html>. Diakses Pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 17:25 WITA

## UNDANG-UNDANG

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

PP No. 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya.

Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

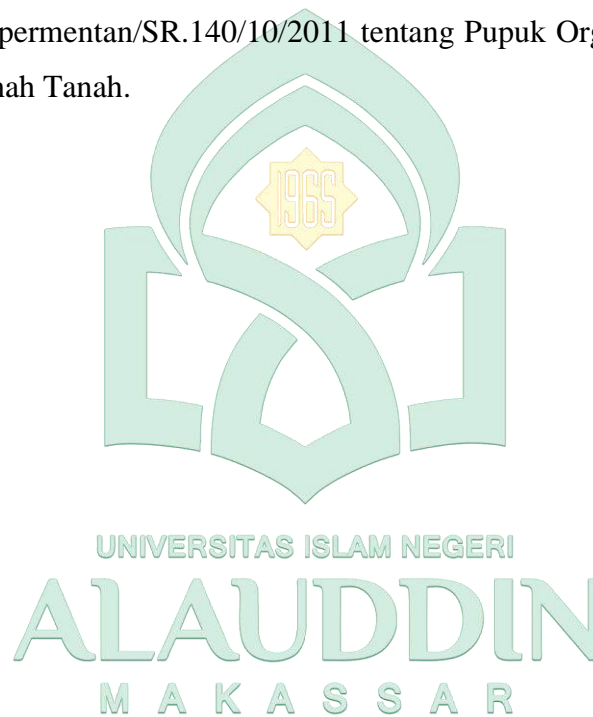
Kepmentan No.237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan,  
Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik

Kepmentan No.239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk An-  
Organik

Permentan No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga  
Eceran Tertinggi untuk sektor Pertanian TA. 2016.

Permentan No.43/permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pendaftaran Pupuk An-organik.

Permentan No. 70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati  
dan Pembenh Tanah.



# LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kamis 27 September 2018, Pukul 08.30





## RIWAYAT HIDUP



Syamrianti Basri adalah nama penulis ini. Penulis lahir dari orang tua, Basri Sattu dan Dra. Hj. St. Syamsiah Sailallah sebagai anak tunggal. Penulis dilahirkan di Sungguminasa pada Tanggal 03 Juli 1997. Anti adalah nama panggilan penulis. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Aisyah Busthanul Athfal di Sungguminasa pada tahun 2002, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri Bontokamase di Sungguminasa pada tahun 2003, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sungguminasa di Kabupaten Gowa pada tahun 2009, dan melanjutkan SMA Negeri 1 Sungguminasa di Kabupaten Gowa pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum A dengan peminatan Pidana angkatan 2015 UIN Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2019. Selama berkuliah mengikuti Organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) dan Organisasi *Independent Law Study* (ILS).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R